

**Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi
Pada Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur
(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

Ummul Khairi Masdar

10300112014

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummul Khairi masdar
NIM : 10300112014
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Pesona Prima Griya Antang
Judul : Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap
Penerapan Sanksi Pada Kejahatan Begal Yang Dilakukan
Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan NO:
101/PID.SUS.Anak/2015/PN.MKS).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 24 Februari 2016

Penyusun,

Ummul Khairi Masdar
NIM: 10300112048

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap penerapan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.)”, yang disusun oleh Ummul Khairi Masdar, NIM 10300112014, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 21 Maret 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Makassar, 28 Maret 2016 M
18 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.




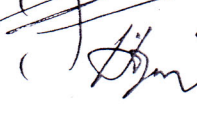
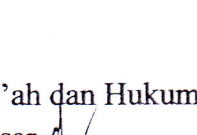
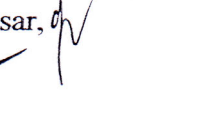
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum.

Munaqisy I : Dra. Nila Sastrawati, M.Si.

Munaqisy II : Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi.

Pembimbing I : Dr. Hamzah Hasan, M.Hi.

Pembimbing II : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam. Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Puji syukur atas segala limpahan rizki dan karunia-Nya kepada penulis serta tidak lupa shalawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul ”Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pada Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.)”

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penulisan ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya daalm pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun imateril sehingga penulisan skripsi

ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. H. Masakkirang, S. Ag, MM dan Ibunda Hj.Rosmi, S. Pd serta saudaraku, Saifullah Masdar, yang selalu membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis serta memberikan segala perhatian baik moral maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M. Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
3. Bapak Dr. Darussalam, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan dan Segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati., M.Si selaku ketua jurusan dan Ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M. Hi selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan izin, dorongan serta arahan sejak akan dimulainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M. HI. dan Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag selaku pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.

7. Buat k' Syamsi Machmoed terima kasih telah membantu banyak hal dalam penyelesaian studi maupun skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Puji Siswadi S. Hum, yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan telah memberikan motivasi ataupun semangat serta dukungan kepada saya.
9. Buat Sahabatku Nilma, Tika, Husnah, Vina, Agus, Khaer, Afgan dan semua teman-teman angkatan 2012 terima kasih karena selalu saling menyemangati satu sama lain dalam hal penyelesaian studi, telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan selalu menjadi kenangan.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan ini. semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 15 Februari 2016

Penulis

UMMUL KHAIRI MASDAR
NIM. 10300112014

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	12-34
A. Batas Usia Anak Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam.....	12
1. Batas usia anak menurut hukum nasional.....	12
2. Batas usia anak menurut hukum Islam	14
3. Faktor-faktor terjadinya kenakalan anak	16

B. Begal Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional.....	19
1. Kejahatan begal dalam pandangan hukum Islam	19
a. Pengertian begal	19
b. Bentuk-bentuk jarimah begal.....	20
2. Kejahatan begal dalam pandangan hukum Nasional	
a. Pengertian begal	23
b. Unsur-unsur begal.....	23
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Dalam Hukum	
Islam Dan Hukum Nasional.....	24
a. Sanksi begal dalam hukum Islam.....	24
b. Sanksi begal dalam hukum Nasional	32

BAB III METODE PENELITIAN 35-38

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 39-59

A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Terhadap	
Anak yang melakukan kejahatan begal	40
B. Upaya Untuk Meminimalisir Kejahatan Begal ditinjau dari	
Hukum Nasional dan Hukum Islam.....	54

BAB V PENUTUP..... 60-61

A. Kesimpulan 60

B. Implikasi 61

DAFTAR PUSTAKA**PEDOMAN WAWANCARA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	= Undang-undang

t.t. = Tanpa tempat penerbit

t.th. = Tanpa tahun penerbit

ABSTRAK

NAMA : UMMUL KHAIRI MASDAR
NIM : 10300112014
JUDUL : TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN SANKSI PADA KEJAHATAN
BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Nasional dan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur? Ada pun sub masalahnya yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan begal dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.? 2. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum Nasional dan hukum Islam?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sosiologis dan normatif syar'i. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian seperti pedoman wawancara, buku catatan dan alat tulis, tape recorder dan kamera. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing data, koding data, dan identifikasi data. Dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi dan mencatat hasil catatan lapangan.

Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan oleh anak yaitu dilihat dari segi usia, terpenuhinya unsur-unsur pidana, dan pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Adapun upaya untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum nasional atau KUHP yaitu upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif. Selain itu upaya untuk meminimalisir kejahatan begal menurut hukum Islam yaitu dengan mengikuti ketentuan yang berdasar pada al-Qur'an karena al-qur'an merupakan hukum Allah yang tidak ada keraguan didalamnya.

Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak agar dilakukan dengan perhatian khusus, guna mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dan diharapkan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku begal dapat menimbulkan efek jera dan dapat membangun watak seorang anak kearah yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang ditentukan dengan kepribadian seorang anak. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.

Adapun definisi anak menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang RI No. 3 tahun 1997, yaitu:

Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-undang RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 berbunyi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa, terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khas mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

¹Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 40.

Allah swt., dalam al-Qur'an surah al-Kahf/18: 46 menyatakan bahwa anak itu sangat berharga dan bahkan anak tersebut dianggap sebagai perhiasan dunia, sebagaimana firman-Nya:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ط وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²

Ayat ini menjelaskan bahwa anak sangat berharga dan merupakan perhiasan dunia, yang harus dijaga dan dididik sesuai dengan agama dan hukum yang berlaku karena anak merupakan ladang amal bagi kedua orang tuanya. Hasil dari didikan kedua orang tuanya menentukan menjadi apa anak itu nantinya. Anak yang tidak didukung dengan didikan yang baik maka akan mengakibatkan kerusakan moral yang ada pada diri anak tersebut. Hingga pada akhirnya anak itu akan melakukan kerusakan termasuk kerusakan yang melanggar hukum.

Anak yang melanggar hukum termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun defenisi anak berkonflik dengan hukum yaitu:

Anak berkonflik dengan hukum merupakan istilah dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebenarnya dua istilah tersebut merupakan 'penyebut halus' dari istilah anak nakal seperti yang telah diatur dalam UU RI No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang menyebutkan bahwa Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana,
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 299.

peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Hal ini juga berkaitan dengan yang ditampilkan oleh Badan Peradilan Amerika Serikat tentang istilah kejahatan anak yang dalam usahanya membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak. Kejahatan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Anak yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang sedang berhadapan dengan kasus hukum tertentu. Meskipun masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan terhadap anak yang sedang dalam proses hukum.⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁵ Dalam melindungi hak anak ada upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejateraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan peraturan khusus yang menangani masalah anak.⁶ Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam undang tersebut bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

³Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, h. 1.

⁴Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, h. 165.

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 40.

⁶Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, h. 121.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Demi terlaksananya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus sesuai Pasal 64 ayat 1 dan 2. Pasal 64 ayat (1) berbunyi “ perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”. Dan Pasal 64 ayat (2) berbunyi “ perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁷

Pasal di atas menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan semakin dituntut pelaksanaannya, dan juga perlunya mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini. Karena masyarakat yang patuh

⁷Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, h. 122.

terhadap hukum berarti mencintai keadilan.⁸ Perlindungan dan mengenalkan hukum kepada anak sangat penting karena melihat kehidupan masyarakat yang modern dan terus menerus berkembang pesat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan tidak hanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan kebudayaan manusia tetapi akan pula membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini khususnya dalam bidang informasi dan elektronika yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas dari kejahatan.

Pada akhir-akhir ini banyak dimuat di berbagai media massa berita tentang kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur. Bagi korban kejahatan begal akan berdampak terhadap timbulnya trauma yang berkepanjangan, terlebih bila kejahatan begal ini semakin merajalelah.

Kejahatan Begal dalam Islam dikenal dengan istilah *al-hirabah* atau perampokan di jalan raya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perampokan itu adalah kejahatan besar, dan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini, yakni QS al-Mai'dah/5: 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat

⁸Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.⁹

Berbeda halnya dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

khususnya pasal 365 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku begal yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.¹⁰

Meskipun telah ada sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional. Namun, kejahatan begal ini tetap saja merajalela dan kebanyakan pelakunya adalah anak di bawah umur. Terbukti data yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar khususnya di tahun 2015 perkara begal dilakukan oleh anak berjumlah 57 perkara, perkara kejahatan begal yang paling banyak masuk yaitu bulan maret sebanyak 16 perkara, dari jumlah keseluruhan perkara proses penanganannya berbeda-beda khususnya dalam penerapan sanksi, ada anak yang

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 113.

¹⁰Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUH Perdata Burgerlijk KUHP KUHAP* (t.t: WIPRESS, 2008), h. 511.

mendapat pembinaan khusus di panti sosial dan ada pula anak yang harus menjalani hukuman didalam penjara,¹¹ sehingga penulis merasa permasalahan ini menarik untuk diteliti dengan judul “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi pada Kejahatan Begal Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap penerapan sanksi pada Kejahatan Begal yang dilakukan Anak di bawah umur. Ada pun sub masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan begal dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.?
2. Bagaimana upaya untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum nasional dan hukum Islam?

C. Deskripsi fokus dan fokus penelitian

1. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat menjelaskan beberapa variable penting agar tidak terjadi kesalahpahaman :

- a. Tinjauan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah pandangan.¹²

¹¹Data Pengadilan Negeri Makassar Pada tanggal 28 Januari 2016

¹²Nur Kholif Hasim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1994), h. 504.

- b. Hukum Nasional menurut kamus hukum adalah Hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu negara.¹³
- c. Hukum Islam adalah : kaidah atau prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa al-Qur'an, Hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabiin maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴
- d. Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Hukuman.¹⁵
- e. Kejahatan Begal adalah: orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat di jalan raya serta melakukan kerusakan dimuka bumi.¹⁶
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

2. Fokus penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, dan Lapas Kelas 1 Makassar. Judul skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum nasional dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.

¹³Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum* (t.t: Wiwik W, 2009), h. 271.

¹⁴Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Perss, 2012), h. 7.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 782.

¹⁶Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* (Makassar: Alauddin University Perss, 2013), h. 174.

¹⁷Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002, *Perlindungan Anak* (Bnadung: CV. Nuansa Aulia, 2007), h. 4.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd dalam bukunya *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*. Karyanya ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Kejahatan Anak, faktor-faktor pemicu anak berkonflik dengan hukum, dan bentuk-bentuk perbuatan anak yang melanggar hukum. Tindak pidana kejahatan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Faktor-faktor pemicu anak berkonflik dengan hukum antara lain: adanya pengaruh teman bermain anak, kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak dari kelas ekonomi rendah, pengaruh kekuatan teman sebaya, hubungan orang tua yang broken home. Bentuk perbuatan anak yang melanggar hukum adalah melakukan kekerasan (pasal 170 KUHP), berjudi, penganiayaan (Pasal 325 KUHP), mengakibatkan orang mati atau luka (Pasal 359 KUHP).¹⁸ Namun buku ini tidak membahas bimbingan apa yang seharusnya di lakukan pemerintah terhadap anak yang orang tuanya mengalami broken home agar tidak mudah dalam melakukan tindak pidana.

A. Rahman I Doi, dalam bukunya *Hudud dan kewarisan*. Karyanya ini menjelaskan tentang *al-hirabah*: Pembegalan atau Perampokan di jalan raya, menurut al-Quran merupakan suatu kejahatan yang gawat. Ia dilakukan oleh satu kelompok atau seseorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir atau orang yang berjalan di jalan raya atau tempat manapun mereka merampas harta korbannya dengan menggunakan kekerasan bila korbanya lari mencari pertolongan. Al-Quran

¹⁸ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, h. 57.

menyebutkan “musuh Allah swt. dan Rasul-Nya” dan merupakan usaha menyebarluaskan kerusakan didunia.¹⁹ Namun buku ini tidak membahas mengenai apa unsur-unsur dari hirabah tersebut.

Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat*. Dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian Al-Hirabah atau Pembegalan Menurut mazhab Hanafiyah, Syafiiyah dan Malikiyah. Menurut mazhab Hanafiyah, *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang relasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang. Menurut Syafi’iyah, *Hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh, mengintimidasi dengan cara kekerasan yang berpegang pada kekuatan dan jauh dari bantuan. Menurut Malikiyah, *Hirabah* adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat serta melakukan perusakan dimuka bumi.²⁰ Namun buku ini tidak membahas mengenai yang mana termasuk alat bukti tindak pidana *hirabah*.

Hamzah Hasan, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* 1. Dalam bukunya menjelaskan unsur-unsur *Hirabah* dilakukan di jalan umum atau di luar permukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian menjadi unsur dalam tindak pidana *hirabah*, misalnya barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri. Kemudian adanya unsur kesengajaan. Kategori kejahatan tersebut termasuk dalam perampokan selama yang

¹⁹A Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

²⁰Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat*, h. 174.

bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan.²¹ Namun buku ini tidak membahas mengenai pandangan Jumhur terhadap pelaku *hirabah* yang tidak dijatuhi Hukuman.

E. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum nasional dan hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian :

1) Kegunaan Teoretis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah khasana ilmu hukum di bidang penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kejahatan tindak pidana begal.

2) Kegunaan Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada para praktisi hukum yang berkompeten menangani masalah begal yang dilakukan anak.

²¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*. cet. Ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 97.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Batas Usia Anak Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

1. Batas Usia Anak Menurut Hukum Nasional

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.²

¹Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 70.

²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 25.

Mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.³

Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Bagaimana apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan apa yang diambil dan apa dasar hukumnya?

Dapat disimak Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa:

- a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali,

³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, h. 26.

atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya

- c. Apabila hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.⁴

2. Batas Usia Anak Ditinjau Dari Hukum Islam

Di mana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan, baik pria maupun wanita. Adapun tanda-tanda yang dimaksud, yaitu:

- a. Para ulama Fikih telah menetapkan beberapa tanda-tanda balig bagi perempuan :

- 1) Telah sampai umur 9 tahun

Seorang anak perempuan yang telah genap berumur 9 tahun yang dihitung mulai sempurnanya Kelahiran seorang bayi dan dihitung berdasarkan perhitungan tahun qamariyah.

- 2) Ihtilam (Keluar Air Mani)

Seorang anak perempuan yang telah ihtilam atau mimpi yang menyebabkan ia mengeluarkan mani atau sebab lain yang menyebabkan ia mengeluarkan air mani.

- 3) Tumbuh Bulu Kemaluan

Biasanya anak yang telah mencapai masa balig secara biologis akan tumbuh bulu di sekitar kemaluan atau ketiak.

- 4) Haid (Menstruasi)

Haid adalah darah yang keluar dari Rahim perempuan pada waktu tertentu secara rutin.⁵

⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, h. 27.

⁵Anis Tanwir Hadi, *Memahami Fikih 5 Untuk Kelas V Madrasah Ibtidayah* (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 20.

b. Adapaun tanda-tanda balig bagi laki-laki

1) Ihtilam (Keluarnya Mani)

Salah satu tanda seorang telah balig adalah apabila telah ihtilam (keluar air mani). Hal itu sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah an-Nur Ayat 59 berikut.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin.⁶

Selain itu, dengan jelas Ras ulullah saw. Bersabda

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ
حَتَّى يَعْقِلَ⁷

Artinya;

Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam dan orang gila hingga berakal. (H.R. Abu Dawud).⁸

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 358.

⁷Sulaiman bin al-Asy'as { Abu> Da>ud al-Sajasta>ni> al-Azdi>, *Sunan Abi> Da>ud*, juz IV (Da>r al-Fikr, t.th), h. 546. Lihat juga Ahmad bin Syu'ai>b Abu> 'Abdurrah{ma>n al-Nasai, *Sunan al-Nasa>I*, juz VIII (Cet. II; Halb: Maktab al-Mathbu>'a>ts al-Isla>miyyah, 1986), h. 156.

⁸Anis Tanwir Hadi, *Memahami Fikih 5 Untuk Kelas V Madrasah Ibtidayah*, h. 26.

2) Telah Sampai Umur 15 Tahun

Seorang anak laki-laki bisa dikatakan balig jika telah berumur 15 tahun ke atas, atau minimal 12 tahun karena pada usia ini seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya.

3) Telah Tumbuh Bulu di Kemaluan

Biasanya anak laki-laki yang sudah balig akan tumbuh bulu di beberapa bagian tubuhnya, seperti di sekitar kemaluan, bulu kaki, kumis dan ketiak.⁹

Dengan demikian ketika seorang anak laki-laki dan anak perempuan telah melalui tanda-tanda perubahan di atas maka dalam Islam tidak lagi dikategorikan sebagai anak melainkan mereka sudah termasuk balig atau dewasa.

3. Faktor-faktor terjadinya Kenakalan Anak

Sebagaimana kita ketahui kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri. Namun, ada batasan yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri. Dan apabila batasan itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Dalam masalah kejahatan anak, ada beberapa teori menjelaskan faktor terjadinya kenakalan anak yaitu:

a. Teori Anomie

Salah seorang tokoh dari teori ini adalah ahli sosiologi Prancis yang bernama Emile Durkheim, menekankan teorinya pada “*normallessness, lessens social control*” artinya mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang

⁹Anis Tanwir Hadi, *Memahami Fikih 5 Untuk Kelas V Madrasah Ibtidayah*, h. 27.

berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan normal, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim, tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.¹⁰

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Menurut Reiss ada 3 komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak. Ketiga komponen tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak,
- 2) Hilangnya kontrol tersebut,
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma di sekolah, orang tua atau lingkungan terdekat.¹¹

c. Teori Sub-Budaya Delikuen

Dalam masyarakat tertentu, kebudayaan induk (dominnan), akan terdapat berbagai macam ragam dari kebudayaan induk. Varian ini dinamakan sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk. Akan tetapi di samping yang sama terdapat pula nilai dan norma yang berbeda dan bertentangan dengan kebudayaan induk. Sebagian anggota

¹⁰Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 121.

¹¹Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, h. 123.

masyarakat sangat peka terhadap sikap dan tingkah laku sesama teman warga kelompoknya. Dalam teori subkebudayaan, pada dasarnya dikemukakan pendapat bahwa pola perilaku yang “menyeleweng” dari norma yang dominan sebenarnya merupakan penyesuaian diri daripada warga yang bersangkutan terhadap nilai dan norma kelompoknya.¹²

d. Teori Labeling

Teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Adapun sebab timbulnya penyimpangan karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. Jika dibandingkan dengan teori kejahatan lainnya, teori ini menggeser fokus perhatian studinya dari pelaku penyimpangan dan perilakunya menuju perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan.¹³

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling, bahwa tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal, rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan, Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa, Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan dan tidak baik, Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling, Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya, Usia tingkatan sosial-ekonomi dan ras merupakan

¹²Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, h. 125.

¹³Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, h. 128.

karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.¹⁴ Konsep teori ini menunjukkan perbuatan penyimpangan tingkah laku awal dan berkaitan dengan psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

e. Teori Kesempatan

Teori ini menjelaskan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Adapun menurut Richard A. Cloward dan Lioyd E. Ohlin, bahwa munculnya subkultur kejahatan atau perilaku penyimpangan dan bentuk perilaku yang muncul bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Jika kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam mencapai kesuksesannya, maka ia akan mengalami frustrasi.¹⁵

B. *Begal menurut hukum Islam dan hukum Nasional*

1. Kejahatan begal dalam pandangan Hukum Islam

a. Pengertian begal

Begal dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Hirabah*. *Hirabah* sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta kekacauan di muka bumi. *Hirabah* adalah pemberontakan subversif-separatis, termasuk yang dilakukan dalam skala

¹⁴Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, h. 129.

¹⁵Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, h. 130.

kecil, bahkan secara perorangan, yang meresahkan masyarakat luas.¹⁶ Mereka menggunakan kekuatan bersenjata untuk meronrong Negara dan mengacau masyarakat, dalam kegiatan ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. Pengertian lain menentang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi Negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim maupun oleh umat lain.

Para Ulama dalam mendefenisikan *hirabah* itu berbeda-beda yaitu:

Menurut Hanafiyah *Hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang relasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut Syafi'iyah defenisi *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

b. Bentuk-Bentuk Jarimah Begal (*Hirabah*)

Dari Defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa ada empat bentuk-bentuk tindak pidana begal:

- (1) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- (2) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh
- (3) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
- (4) Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.¹⁷

¹⁶Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Perss, 2011), h. 79.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 95.

c. Pelaku *Hirabah* dan Syarat-syaratnya

Hirabah dapat dilakukan baik kelompok, maupun perorangan yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Namun, para Ulama berbeda pendapat mengenai pelaku *hirabah* ini. Menurut Hanafiyah, pelaku *hirabah* adalah setiap orang yang melakukan perbuatan secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian menurut Hanafiyah orang yang ikut terjun secara langsung dan mengambil harta, membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan, begitupun orang yang hanya ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan. Pendapat Hanafiyah ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan zhahiriyah. Lain halnya dengan Imam Syafi'I berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu dan diancam hukuman ta'zir.¹⁸

Adapun syarat-syarat dikenakan hukuman Had dalam tindak pidana *hirabah* yaitu ketika menyangkut tempat dilakukannya jarimah *hirabah*. Syarat-syarat tersebut di antaranya:

- 1) Jarimah *hirabah* harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh hanafiyah, apabila jarimah *hirabah* terjadi di luar negeri Islam maka pelaku tidak dikenakan hukuman had. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan Zhahiriyah tidak mensyariatkan hal ini

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 96.

melainkan pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah *hirabah* terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.

- 2) *Hirabah* harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian, pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifa tidak mensyariatkan hal ini, menurut mereka perampokan yang terjadi dalam kota atau luar kota hukumannya sama yaitu tetap berlaku hukum had.
- 3) Malikiyah dan Syafi'iyah mensyariatkan adanya kesulitan untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena lemahnya petugas keamanan, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan. Dengan demikian apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.¹⁹

d. Pembuktian Untuk Jarimah *Hirabah*

Jarimah *Hirabah* dapat di buktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:

1) Pembuktian dengan Saksi

Dalam jarimah *hirabah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Saksi untuk jarimah *hirabah* minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa dari orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan, apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan.

2) Pembuktian dengan Pengakuan

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 98.

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa harus diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.²⁰

2. Kejahatan begal dalam pandangan Hukum Nasional

a. Pengertian begal

Begal dalam Hukum Nasional di kenal sebagai penodong atau perampokan. Penodongan adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Kata penodong dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah.²¹ Dan perampokan adalah kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan disertai dengan kekerasan.²²

Perampokan merupakan kejahatan terhadap harta milik seseorang yang dilakukan secara paksa dan secara terang-terangan. Dengan demikian ada pun unsur-unsur perampokan yaitu:

- 1) Merebut harta milik orang lain secara paksa, maksudnya dilakukan dengan kekerasan, agar barang tersebut berpindah ketangannya,
- 2) Dilakukan dengan terang-terangan, maksudnya datang kepada si korban tanpa sembunyi-sembunyi.²³

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 121.

²²Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 87.

²³Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), h. 57.

Perampokan dalam hukum nasional termasuk pada kategori pencurian akan tetapi hukuman merampok atau begal jauh lebih berat jika di bandingkan dengan hukuman mencuri.

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional

1. Sanksi Begal Dalam Hukum Islam

Sanksi hukum terhadap pelaku pidana begal atau perampokan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri, yaitu dibunuh, atau disalib, (dipotong tangan dan kakinya secara bersilang) atau dibuang. Hukuman had berlaku bagi seorang pembegal.

Ketentuan sanksi bagi pelaku *hirabah*, didasarkan pada dialog Rasulullah saw. Dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirabah*? Jibril menjawab “barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potongan tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh, bunuhlah dan barang siapa siap membunuh dan mengacau tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah.”²⁴

Ditegakkannya hukuman had bagi pelaku *hirabah* adalah untuk menjamin tegaknya situasi keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena *hirabah* itu merupakan kejahatan besar dan sangat berbahaya, sebab biasanya pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. *Hirabah* lebih berbahaya dari pada pencurian, sebab di

²⁴Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, h. 80.

samping merampas harta dan rizki orang lain yang diperoleh dengan susah payah, juga dilakukan dengan kekuatan bersenjata bahkan siap membunuh pemilik harta.²⁵

Adapun Had bagi seorang pembegal akan dijatuhkan apabila telah terpenuhi fakta tentang *qutha at-thariq* (hukum pembegal) telah terpenuhi yaitu:

- a. Terjadi diluar kota. *Qutha at'thariq* hanya terjadi di tempat yang jauh dari pertolongan yang bisa datang dengan cepat. Namun jika mereka menyerang kota untuk membunuh, merampas dan melakukan terror maka mereka juga dianggap melakukan *Qutha at'thariq* dan tetap ditetapkan had *Qutha at'thariq* bagi mereka.
- b. Mereka membawa persenjataan untuk membunuh, seperti pedang, senapan, senapan otomatis, golok atau pisau yang bisa membunuh.
- c. Mereka datang secara terang-terangan, mengambil harta benda secara paksa dan menetap ditempat-tempat mereka.²⁶

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku kejahatan begal atau perampokan sesuai kadar berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Dibunuh dan disalib bagi yang melakukan pembunuhan dan perampasan terhadap harta sekaligus.
- b. Dibunuh bagi yang melakukan pembunuhan tanpa sempat mengambil harta milik korbannya.
- c. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang bagi yang hanya melakukan perampasan terhadap harta tanpa mencederai pemiliknya.

²⁵Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, h. 81.

²⁶Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 252.

- d. Dipenjarakan bagi yang melakukan kegiatan perampokan dengan kekerasan, namun tak berhasil apa-apa, baik membunuh maupun merampas harta korbanya.²⁷

Menurut mereka, masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari hukuman yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 33. Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatannya. Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut selain pembunuhan. Sedangkan Zhahiriyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis perbuatan tersebut.²⁸

Adapun yang menjadi sebab perbedaan pendapat adalah perbedaan penafsiran para ulama terhadap huruf *aw* (أَوْ) yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

²⁷Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), h. 58.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99.

dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).²⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf *aw* (أ) dalam ayat tersebut di maksudkan sebagai *bayan* (penjelasan) dan sebagai *tafshil* (rincian). Dengan demikian, menurut mereka hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan berat ringannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perampokan. Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa huruf *aw* (أ) dalam Surah Al-Maidah ayat 33 dimaksudkan sebagai *takhyir* (pilihan). Menurut mereka, ayat tersebut mengandung arti bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dipandanginya paling tepat dan sesuai dengan jenis tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh pelaku.³⁰

Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, adapun rincian hukuman untuk masing-masing perbuata, seperti:

1) Hukuman untuk Menakut-nakuti

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad hukuman bagi pelaku perampokan dengan cara menakut-nakuti adalah pengasingan (*an-nafyu*). Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

..... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

...atau diasingkan dari tempat kediamannya.. (QS. Al-Maaidah:33)

Pengertian pengasingan ini berbeda-beda di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya perampokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan adalah dipenjarakan,

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 113.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 100.

tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Syafi’I mengartikan pengasingan dengan penahanan, baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengasingan adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertobat.

2) Hukuman untuk Mengambil Harta Tanpa Membunuh

Hukuman bagi pelaku perampokan jika hanya mengambil harta tanpa membunuh maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah AL-Maidah ayat 33:

.... أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ

“...atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik...”

Imam Malik berpendapat, bahwa huruf *aw* (أَوْ) dalam Surah Al-Maidah ayat 33 hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta diserahkan pada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat dalam suruh tersebut, asal jangan pengasingan. Jarimah ini tidak boleh lebih ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan menurut Zhahiriyyah, hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33.

3) Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan itu riwayat dari Imam Ahmad hukuman bagi pelaku perampokan yang membunuh tanpa mengambil harta

adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa salib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Sy'ah Zaidiyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

4) Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib, tanpa potong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman. Yang pertama : potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.³¹

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus diatas, berkaitan dengan persyaratan nishab yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat *hirabah*. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potongan tangan dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki.

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Alasan lain yang dikemukakan oleh

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 101.

jumhur ulama bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan tindakan penyiksaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh Islam, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Syadad ibn Aus, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قُتِلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا دُبِحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْخَ دِيحَتَهُ³²

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya. (HR. Muslim dan Ahmad)³³

Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Alasan mereka adalah hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung kepada penyebarluasan berita penyaliban itu di kalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari. Pembatasan waktu penyaliban samapai tiga hari merupakan pendapat yang tepat, karena manusia yang telah meninggal dunia apabila

³²Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-H{usai>n al-Qusyay>ri> al-Nai>sa>bu>ri>, *Sahih Muslim*, juz. V (Beirut: Da>r Ih{ya> al-Tara>tsi al-'Arabi>, t.th), h. 1548. Lihat juga Abu> 'Abdilla>h Ah{mad bin Muh{ammad bin Hanbal bin Hila>l bin Asadi al-Syaiba>ni>, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz. VI (Cet. I; Beirut: 'A<lim al-Kutub, 1998), h. 124.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 103.

lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dalam hal ini tentu akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia yang masih hidup yang ada di sekitarnya.³⁴

Namun Hukuman Had bagi perampokan dalam Islam dapat gugur ketika:

- a. Korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya,
- b. Pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya,
- c. Orang yang menjadi korban tidak mempercayai para saksi,
- d. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan,
- e. Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ط فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh penguasa maka hukuman had gugur baginya. Akan tetapi tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu

³⁴Ahmad War di Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 103.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Cet. I (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), h. 113.

masih ada maka barang tersebut harus dikembalikan. Dan jika barang tersebut sudah tidak ada maka ia wajib menggantinya, baik dengan uang maupun dengan barang yang sejenisnya. Namun jika tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangkap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak individu.³⁶

2. Sanksi Begal Dalam Hukum Nasional

Sanksi terhadap pelaku begal dalam hukum Nasional itu berdasar pada KHUP. Ketentuan dalam KUHP dan UU kita cermati, sebenarnya telah bernapaskan nilai-nilai syari'ah, sebagaimana dalam Tafsir al-Qurthubiy seperti yang dikutip Hamka Haq, ditegaskan bahwa pemerintah dapat memilih bentuk hukuman sesuai dengan bunyi ayat, demikian juga pendapat Malik dan Umar bin Abdul Azis, Mujahid al-Dahhak, al-Nakhai, meraka berkata dalam menghukum para pemberontak (subversif) pemerintah dapat memilih salah satu di antara hukuman yang telah ditentukan yakni: hukuman mati, (langsung), salib, potong tangan dan kaki dan nafy (pengasingan, pengucilan atau penjara).³⁷

Dan al-Qur'an juga menegaskan bahwa keamanan menjadi cita-cita bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini, karena keamanan juga menjadi pokok pangkal kemakmuran dan membuka jalan untuk bekerja sesuai tugas dan cita-cita masing-masing. Kekuasaan Negara hendaklah ditunjukan untuk terpeliharanya keamanan.³⁸

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 104.

³⁷Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, h. 81.

³⁸Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, h. 79.

Hal ini sesuai dalam perkara putusan nomor 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN/MKS. bahwa perkara ini adalah perkara tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang mendapat luka berat atau mati , dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Maka pasal yang didakwakan adalah pasal 365 ayat (4) subs pasal 351 ayat (3) KUHP.

Adapun isi dari Pasal 365 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.³⁹

Dari pasal 365 KUHP yang telah disebutkan, adapun hukuman untuk pelaku kejahatan begal bagi anak yang berumur 1-13 tahun jika melakukan kejahatan

³⁹Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUH Perdata Burgerlijk KUHP KUHAP* (t.t: WIPR ESS, 2008), h. 511.

ataupun tindak pidana maka sanksinya itu dikembalikan ke orang tuanya, namun untuk anak yang berumur 14-18 tahun maka dikenakan hukuman $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari orang dewasa, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman yang dijelaskan dalam pasal 365 KUHP. Misalnya perkara No. 101/Pid.Sus.Anak/PN.Mks atas nama MF yang berumur 17 tahun yang melakukan kejahatan begal dan mengakibatkan kematian terhadap korban maka sanksi atau hukuman yang diberikan kepada narapidana yaitu 7 tahun penjara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, peneulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan.

A. *Jenis dan lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. *Penelitian Kualitatif* adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Kota Makassar yang difokuskan di:

- a. Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Lapas Kelas 1 Makassar
- c. Tokoh Masyarakat

B. *Pendekatan Penelitian*

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan yuridis normatif

¹Muh. Khalifah Mustamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 19.

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Sosiologis

Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.² Dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir

c. Pendekatan normatif Syar'i

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Field research atau penelitian lapangan yang secara langsung turun ke lapangan guna memperoleh data yang ada di Kota Makassar, yakni data yang akan diperoleh dari:

1. Masyarakat
2. Pengadilan Negeri Makassar
3. Lapas Kelas 1 Makassar

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan yaitu teknik untuk mencari

²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14.

bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan.

D. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³
2. Observasi adalah pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

³Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2011), h. 186.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- c. *Identifikasi Data* yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan dari catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Begal

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat yang di anggap merupakan lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan begal khususnya dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.

Anak yang tergolong masih polos dan memiliki tingkat kecerdasan yang belum setara dengan orang dewasa mampu terlibat dan bahkan mampu melakukan tindak pidana yang tergolong berat. Anak yang pada umumnya masih memiliki pola pikir yang sederhana bagaimana mungkin mampu merencanakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Untuk menjawab pernyataan di atas, sesuai hasil penelitian yang penulis dapatkan kronologi perkara itu awal mula terjadinya perkara ini adalah pada hari selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di jalan Veteran Utara Makassar dimana pada saat itu terdakwa MF berboncengan sepeda motor bersama lelaki AN dan lelaki HA, di mana saat itu lelaki HA yang mengemudikan sepeda motor sedangkan posisi terdakwa paling belakang. Selanjutnya terdakwa dan teman-temanya melihat korban yang sedang berhenti di pinggir jalan sambil

menelpon, kemudian lelaki AN teman terdakwa memutar balik sepeda motornya lalu mendekati korban.¹

Pada saat didekat korban, terdakwa MF turun dari motor lalu mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban dan pada saat itu korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa mengeluarkan badiknya dimana korban sempat memegang badik terdakwa hingga tangan korban tergores. Hingga pada akhirnya terdakwa menusukkan badiknya kearah dada korban dan setelah itu terdakwa bersama temannya meninggalkan korban.

Dari kronologi perkara di atas terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada anak yang melakukan kejahatan begal. Suparman Nyompa, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan:

“Anak sedapat mungkin untuk tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi jika dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa seseorang dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan maka ada beberapa pertimbangan dalam memberikan sanksi.”²

Lebih jelas beliau mengatakan bahwa faktor pertimbangan dalam penjatuhan Sanksi terhadap pelaku kejahatan begal adalah dilihat dari Usia anak, terpenuhinya unsur-unsur Pidana, dan Pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.

Berdasarkan faktor pertimbangan di atas maka ada beberapa uraian mengenai usia anak, terpenuhinya unsur-unsur pidana dan pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu:

¹Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

²Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

Usia Anak, Usia adalah faktor penting yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam penjatuhan sanksi, karena ada perbedaan batas usia anak dalam KUHPerdara dan KUHP. Batas usia anak dalam hukum perdata yaitu 1-18 tahun, sedangkan dalam hukum pidana kategori anak juga mulai dari 1-18 tahun. Akan tetapi dalam hukum pidana ada pengecualian, anak yang berusia 14-18 tahun apabila ia melakukan tindak pidana yang tergolong berat seperti pembunuhan maka anak tersebut akan dikenakan sanksi penjara $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Misalnya jika orang dewasa yang melakukan kejahatan begal dan hukuman yang dikenakan itu adalah 15 tahun penjara sedangkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur maka hukuman yang dikenakan adalah seperdua dari hukuman orang dewasa yaitu 7 tahun penjara.

Terpenuhinya Unsur-Unsur Pidana, Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang mendapat luka berat atau mati, dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 ayat (4) subs pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

1. Pasal 365 ayat (4) KUHPidana yang berbunyi : hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.³ Ada beberapa unsur dalam pasal tersebut, yaitu :

³Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUH Perdata Burgerlijk KUHP KUHAP* (t.t: WIPRESS, 2008), h. 511.

a. Barang Siapa

Unsur tersebut terpenuhi bahwa tersangka lk. MF berteman mengambil barang tanpa meminta ijin kepada korban lk. RL selaku pemiliknya, kemudian unsur didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan direkam CCTV

b. Mengambil Barang Milik

Unsur tersebut terpenuhi dimana barang berupa HP merek Samsung Galaxy core 2 warnah putih milik korban lk. RL diambil oleh tersangka MF kemudian HP tersebut diserahkan kepada tersangka lk. AN untuk dijual, kemudian unsur didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan rekaman CCTV.

c. Secara Bersama-sama

Unsur ini terpenuhi dimana tersangka lk. MF dan tersangka lk. AN serta tersangka HA datang ke TKP dan setelah sampai di TKP tersangka lk. MF dan tersangka lk. AN turun dari sepeda motor lalu mengambil secara paksa barang berupa HP milik korban sedangkan tersangka HA menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya, kemudian unsur didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan rekaman CCTV.

d. Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang

Unsur ini terpenuhi dimana saat tersangka lk. MF mengambil dengan paksa atau melawan hukum barang berupa HP milik korban dan pada saat korban berusaha mempertahankan hp miliknya tersangka lk. MF menikam paha korban lk. RL namun korban memegang badik tersebut akan tetapi tersangka menarik badik yang sementara dipegang oleh korban yang mengakibatkan telapak tangan korban mengalami luka iris, kemudian korban berusaha melarikan diri namun tersangka langsung menikam dada sebelah kiri tepat pada jantung korban sebanyak satu kali

yang mengakibatkan korban meninggal dunia, unsur ini didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan rekaman CCTV.⁴

2. Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang berbunyi : jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁵ Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

a. Barang Siapa

Unsur ini terpenuhi dimana tersangka lk. MF melakukan penganiayaan dengan cara mengiris telapak tangan sebelah kanan dengan menggunakan sebilah badik kemudian menikam tubuh korban tepatnya mengenai pada bagian dada sebelah kiri tepat pada jantung korban masing-masing satu kali yang mengakibatkan seketika korban meninggal dunia, unsur ini didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit bhayangkara Makassar serta hasil rekaman CCTV.

b. Dengan Sengaja

Unsur ini terpenuhi dimana tersangka lk. MF dalam keadaan sadar atau bukan karena gangguan kejiwaan melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mengiris telapak tangan korban kemudian menikam dada sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah badik masing-masing sebanyak satu kali yang menyebabkan korban meninggal dunia unsur ini didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit bhayangkara Makassar serta hasil rekaman CCTV.

⁴Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

⁵Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUH Perdata Burgerlijk KUHP KUHAP* (t.t: WIPRESS, 2008), h. 508.

- c. Merusak Kesehatan Sehingga Mengalami Luka yang Menyebabkan Orang meninggal

Unsur ini terpenuhi dimana tersangka melakukan penganiayaan dengan cara mengiris teapak tangan sebelah kanan dengan menggunakna sebilah badik kemudian menikam tubuh korban bagian dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia, unsur ini didukung oleh keterangan tersangka lk. MF dan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit bhayangkara Makassar serta hasil rekaman CCTV.⁶

Pembuktian di Persidangan Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah, ada beberapa alat bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Lampiran alat bukti perkara No.46/RT.3/Ep/04/2015

Barang bukti yang disita oleh petugas Polsekta Makassar dalam perkara ini berdasarkan pasal 38 ayat (2) KUHAP yaitu;

- a. 1 (satu) lembar jaket kain parasut lengan panjang warna merah.
- b. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna putih, dengan merek defender .
- c. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru, dengan merek JX RIVIL.
- d. Rekaman CCTV yang dituangkan atau dicopy dalam kepingan VCD.
- e. 1 (satu) buah dos HP Samsung galaxy core 2 dimana pada posisi dos tersebut terdapat sticker warna putih dengan nomor IMEI : 354876/06/015493/2 dan 354877/06/15493/0.

⁶Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

- f. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, yang bermerek himmel, mempunyai gambar berbentuk bundar.
- g. 1 (satu) lembar celana punting jeans warna biru merek SHOCK S&Z SCEKALI.

2. Keterangan Saksi-Saksi Dan Tersangka

Saksi I (Pelapor)

Nama : LT, lahir di Bone Tondo, tanggal 04 agustus 1969/Umur 45 tahun, suku Muna, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Angkatan Darat, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Jl. Cenderawasih asrama mattoangin barak K-2 No. 3 Kota Makassar, No. HP : 085233470613.⁷

Menerangkan:

- a. Bahwa benar, terjadi perkara pada hari selasa tanggal 10 februari 2015 sekitar jam 23.30 Wita di jalan Veteran Utara kota Makassar.
- b. Bahwa benar, jika yang menjadi korban dalam perkara pencurian yang menyebabkan matinya orang adalah lk. RL.
- c. Bahwa benar, jika awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah saksi berada di kantor Polsek Makassar kemudian saksi mengetahui nama pelaku yaitu lk. MF.
- d. Bahwa benar, jika pelaku mencuri HP merek Samsung milik korban kemudian minikam dada sebelah kiri korban sebanyak satu kali serta menggores telapak tangan kanan korban sebanyak satu kali pula.
- e. Bahwa benar, penyebab terjadinya perkara pencurian yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh lk. MF.
- f. Bahwa Benar, saksi tidak mengetahui teman pelaku lk. MF saat melakukan pencurian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- g. Bahwa benar, setelah saya melihat luka korban dirumah sakit Bayangkara kemudian saksi mengetahui kalau pelaku menggunakan senjata tajam jenis badik.
- h. Bahwa benar, jika yang dialami korban lk. RL adalah luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri serta luka iris pada telapak tangan bagian kanan yang menyebabkan korban lk. RL meninggal dunia.
- i. Bahwa benar, saat terjadi perkara tersebut saksi sedang berada dirumah tempat tinggalnya di jalan Cenderawasih asrama Mattoangin Makassar.
- j. Bahwa benar, saksi mengetahui perkara tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan menyuruh saksi untuk segera ke rumah sakit Bayangkara Makassar.
- k. Bahwa benar, jika seseorang menyuruh saksi untuk segera kerumah sakit Bayangkara Makassar karena korban lk. RL telah meninggal dunia.
- l. Bahwa benar, jika yang saksi ketahui jika korban lelaki RL telah meninggal dunia karena ditikam pada bagian dada sebelah kiri sebanyak satu dengan menggunakan benda tajam berupa sebilah badik serta diiris pada telapak tangan dengan menggunakan benda tajam.⁸

⁷Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

⁸Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

Saksi II

Nama : SB, Lahir di Muna, Tanggal 05 Juni 1954 / Umur 60 tahun, Suku Muna, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir PGA (tidak tamat), Alamat asrama Lompobattang B No. 1 Kota Makassar.

Menerangkan:

- a. Bahwa benar, terjadi perkara pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 23.30 Wita di jalan Veteran Utara kota Makassar.
- b. Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan perkara tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya orang namun setelah dikantor polisi kemudian saksi mengetahui kalau pelakunya adalah lk. MF.
- c. Bahwa benar, yang menjadi korban adalah lk. RL, dimana pelaku melakukan hal demikian dengan cara mengambil hp merek Samsung milik korban kemudian mengiris telapak tangan kanan serta menikam dada sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah badik.
- d. Bahwa benar, saksi kenal dengan korban dimana korban merupakan keponakan saksi.
- e. Bahwa benar, saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi perkara pencurian yang menyebabkan matinya orang yang dialami korban lk. RL.
- f. Bahwa benar, saksi bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 21.30 Wita dimana saat itu korban datang kerumah saya diasrama Lompobattang Makassar.
- g. Bahwa benar, maksud dan tujuan korban lk. RL datang dirumah saksi untuk mempertanyakan pembayaran rekening air PAM.
- h. Bahwa benar, saksi melihat pakaian yang digunakan oleh korban dimana korban memakai baju jaket lengan panjang warna merah kemudian memakai celana panjang warna biru.
- i. Bahwa benar, korban tidak pernah mempunyai dendam atau permasalahan dengan siapapun.
- j. Bahwa benar, korban berada dirumah saksi hanya sekitar 25 menit.
- k. Bahwa benar, saat kejadian saksi sedang berada di rumah tempat tinggalnya.
- l. Bahwa benar, saksi mengetahui perkara tersebut dari seseorang yang tidak dikenal kemudian menelpon dan menyampaikan kepada saksi bahwa korban lk. RL telah meninggal dunia.⁹

⁹Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

Saksi III

Nama : SL, Lahir di Makassar, tanggal 16 oktober 1994 / Umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, Suku Makassar, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan SPG Ramayana Mall Panakukang, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Jln. Paccerakang, Kampong batu, Kec. Pattalasang, Kab. Gowa.

Menerangkan :

- a. Bahwa saksi menerangkan jika terjadinya perkara tersebut pada hari selasa tanggal 10 februari 2015 sekitar jam 23.30 wita tepatnya di jalan veteran utara kota Makassar.
- b. Bahwa saksi menerangkkn jika setelah saksi berada di kantor polisi kemudian saksi mengetahui bahwa pelaku dalam perkara tersebut adalah lk MF dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah RL.
- c. Bahwa saksi kenal dengan korban di mana saksi merupakan kekasih korban lk RL.
- d. Bahwa saksi menerangkan jika pelaku mengambil sebuah HP merek Samsung warna putih milik korban kemudian menikam tubuh bagian dada sebelah kiri serta mengiris telapak tangan korban sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 kali.
- e. Bahwa saksi menerangkan jika pada saat terjadinya perkara tersebut saksi sedang berada di rumah tempat tinggalnya setelah pulang kerja dari Mall Panakukang.
- f. Bahwa saksi menerangkan jika pelaku melakukan perkara tersebut dengan menggunakan sebilah badik kemudian menggores telapak tangan korban sehingga mengalami luka iris kemudian pelaku menusuk dada sebelah kiri sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian pelaku mengambil barang milik korban.
- g. Bahwa saksi menerangkan jika tidak mengetahui teman pelaku yang lain pada saat pelaku lk MF melakukan perkara tersebut.
- h. Bahwa saksi menerangkan jika saksi terakhir bertemu dengan korban pada saat sebelumterjadinya perkara tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 10 februari 2015 sekitar jam 22.30 wita di tempat kerja saya yaitu di Mall Panakukang Makassar.
- i. Bahwa saksi menerangkan jika pada saat kejadian korban lk RL menggunakan jaket parasut lengan panjang warna merah serta menggunakan celana panjang jeans warna biru.
- j. Bahwa saksi menerangkan jika saksi melihat dan mengetahui korban lk RL mempunyai atau memiliki HP merek Samsung galaxy core 2 warna putih.
- k. Bahwa saksi menerangkan jika maksud dan tujuan korban bertemu dengan saksi di tempat kerja korban di mall panakukang Makassar adalah untuk memberikan ATM milik saksi serta Uang gaji saksi yang sebelumnya saksi memberikan kartu ATMnya kepada korban lk RL untuk menarik gaji yang sudah masuk direkening saksi.
- l. Bahwa saat diperhatiakn 1 lembar baju jaket lengan panjang kain parasut warna merah serta 1 lembar celana jeans warna biru yang digunakan korban pada saat kejadian, saksi masih mengingat dan mengenalnya.
- m. Bahwa saksi menerangkan jika masih banyak yang mengetahui kejadian tersebut namun saksi tidak mengenalnya.
- n. Bahwa saksi menerangkan jika semua keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

- o. Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak pernah merasa dipaksa, ditekan atau diarahkan dalam memberikan keterangan kepada penyidik.¹⁰

Keterangan Tersangka:

NAMA : MF, lahir di Makassar tanggal 13 Mei 1998 / umur 16 tahun, Suku Makassar, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tukang tempel ban, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Alamat Jl. Sinassara Kota Makassar.¹¹

Menerangkan :

Pasal 351 sama pasal 365 didakwakan, 7 tahun penjara tapi menjelang satu tahun ini kujalani, sebenarnya 3 orang tapi 2 temanku kabur. i saya dikenali mukaku karena tarekam. i CCTV, ini awalnya tidak kurencanakan. i itu temanku yang dua orang AN sama HA baru juga satu minggu kukenal, itu hari najemputka di bengkel tempat kerjaku bilang ayo pergi jalan-jalan deh jadi ikutma juga, waktu di jalan ada cowo singgah menelpon di pinggir jalan jadi itu HA naputar motornya baru nasuruhka ambil hpnya temanku AN ambil kunci kontaknya trus itu cowo melawan. i jadi kuambil badiknya temanku baru kutobo. i.¹²

Hal ini didukung dengan data pengadilan pada saat tersangka diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

- a. Bahwa benar, tersangka sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian di wilayah hukum polsek Makassar yang mana tersangka divonis hukuman selama 3 bulan.
- b. Bahwa benar tersangka menceritakan riwayat hidup singkatnya dimana tersangka dilahirkan di Makassar pada tanggal 13 Mei 1998 / umur 17 tahun, oleh orang tua saya lelaki MB, perempuan MA, saya anak ketiga dari empat bersaudara yang pertama lelaki RH, kedua FI, ketiga saya sendiri dan keempat perempuan NE, saat ini saya tinggal bersama ibu saya di jalan Sinassara.

¹⁰Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

¹¹Muhammad Farhan (17 tahun), Narapidana Kejahatan Begal, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 4 Februari 2016.

¹²Muhammad Farhan (17 tahun), Narapidana Kejahatan Begal, *Wawancara*, Lapas Kelas 1 Makassar, 4 Februari 2016.

- c. Bahwa benar, tersangka menjelaskan perkara tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 10 februari 2015, sekitar jam 23.30 Wita di jalan Veteran Utara Kota Makassar tepatnya di depan Toko Cahaya Bintang Motor Makassar.
- d. Bahwa benar, tersangka menjelaskan ketika melakukan perkara pencurian yang menyebabkan matinya orang bersama dengan lelaki AN dan lelaki HA.
- e. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika barang yang dicuri yaitu HP Samsung warna putih.
- f. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika awalnya tersangka sedang berbonceng tiga menggunakan sepeda motor bersama lelaki AN dan lelaki HA dimana pada saat itu lelaki HA yang mengendarai sepeda motor, lelaki AN ditengah dan tersangka dibelakang kemudian melihat korban sedang menelepon karena tersangka melewati korban kemudian tersangka memutar dan menghampiri korban kemudian tersangka langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban kemudian tersangka langsung merampas HP korban yang sedang dipegang karena korban melakukan perlawanan kemudian tersangka mengeluarkan sebilah badik sehingga korban memegang badik tersangka dan tersangka menariknya sehingga tangan korban berdarah kemudian tersangka menusuk dada sebelah kiri korban dan lelaki AN juga menusuk korban dengan menggunakan busur tetapi tersangka tidak mengetahui bagian tubuh mana korban yang ditusuk oleh lelaki AN dan lelaki HA tetap diatas sepeda motor setelah mendapatkan HP korban kemudian tersangka langsung melarikan diri bersama lelaki AN dan lelaki HA dengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Gatot Subroto Kota Makassar tepatnya di dekat masjid.
- g. Bahwa benar, tersangka menerangkan jika barang bukti satu buah HP Samsung warna putih tersebut dibawa oleh AN dan telah dijual diman tersangka mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 dari hasil penjualan HP milik korban.
- h. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika uang hasil penjualan HP milik korban digunakan untuk bermain game internet dan membeli rokok.
- i. Bahwa benar, tersangka menerangkan jika tersangka menusuk dada sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak satu kali.
- j. Bahwa benar, tersangka menjelaskan penyebab sehingga tersangka menusuk dada korban karena korban melakukan perlawanan.
- k. Bahwa benar, jika sebilah badik yang saya gunakan untuk menusuk korban tersangka dapatkan dari lelaki AN dimana pada saat itu badik tersebut tersangka selipkan pada pinggang sebelah kirinya.
- l. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika lelaki AN menusuk korban dengan menggunakan anak busur sebanyak satu kali.
- m. Bahwa benar, anak busur yang digunakan lelaki AN menusuk korban ada pada lelaki HA dan sepeda motor yang digunakan tersangka bernama lelaki AN dan lelaki HA melakukan pencurian tersebut juga ada pada lelaki HA karena sepeda motor tersebut milik lelaki HA.
- n. Bahwa benar, tersangka menerangkan korban menggunakan jaket warna merah, sedangkan tersangka yang lain AN memakai baju putih sedangkan lelaki HA memakai baju warna merah.
- o. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika pada saat tiba di jalan Gatot Subroto Kota Makassar tepatnya disamping masjid tersangka langsung memberikan badik yang digunakan untuk menusuk korban kepada lelaki AN kemudian lelaki AN pergi untuk menjual satu buah HP sedangkan tersangka bersama HA menunggu, kemudian setengah jam kemudian AN datang dan langsung memberikan tersangka

- uang sebesar Rp. 150.000 namun tersangka tidak mengetahui berapa yang diberikan kepada lelaki HA lalu tersangka serta AN dan HA langsung pulang ke rumah masing-masing.
- p. Bahwa benar, tersangka membenarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan kepadanya dimana tersangka bersama lelaki AN dan lelaki HA melakukan pencurian dengan kekerasan.
 - q. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika ada beberapa warga yang melihat kejadian tersebut dimana tersangka mengetahui jika korban telah meninggal dunia saat tersangka diamankan di kantor polisi.
 - r. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika lelaki AN bertempat tinggal di jalan Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar dan lelaki HA bertempat tinggal di Rappokalling Kota Makassar.
 - s. Bahwa benar, tersangka menjelaskan jika tidak ada saksi yang dapat meringankan tersangka dalam perkara tersebut.
 - t. Bahwa benar, tersangka membenarkan tempat terjadinya perkara tindak pidana pencurian yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan bersama dengan lelaki AN dan lk. HA yaitu di jalan Veteran Utara Kota Makassar tepatnya didekat lampu merah perempatan jalan sungai saddang dan jalan Veteran Utara dimana terdapat tumpukan ban.
 - u. Bahwa benar, tersangka membenarkan pada saat diperlihatkan kepadanya baju dan celana yang dipakai pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang bersama lk. AN dan lk. HA.¹³

3. Alat Bukti Surat

- a. Surat hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : VeR / 02-Mt/2015/Rumkit, Tanggal 16 februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik bernama : dr. MAULUDDIN M,Sp.F, NO. SIP 446/05-09/DS.F/SIP.1/DKK/V/2013, NO. HP : 082120564587 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bertempat di Instalasi kedokteran forensik korban lelaki RL ditemukan:

- 1) Tampak satu buah luka tusuk pada dada kiri dengan ukuran 2,5 cm X 1 cm dan kedalaman 10 cm.
- 2) Tampak satu buah luka terbuka pada telapak tangan kanan dengan ukuran 2,5 cm X 1 cm.

¹³Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

b. Hasil pemeriksaan ahli laboratorim forensic polri cabang Makassar dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. lab : 449/KBF/II/2015 tanggal 16 maret 2015, yang ditanda tangani oleh kepala laboratorium forensik polri cabang Makassar berbama : Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat / Nrp : KOMBES POL / 66090301, berupa:

- 1) Satu lembar baju kaos oblong warna putih merek devender milik RL.
- 2) Satu lembar kaos oblong lengan pendek warna hitam dengan merek himmel milik MF.
- 3) Satu lembar celana punting jeans warna biru merek SHOCK S&Z SCEKALI milik MF.

c. Petunjuk

Adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dari beberapa Pertimbangan diatas maka perkara No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks. di Putuskan sebagai berikut:

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan anak di pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan terdakwa:

Nama : MF

Tempat lahir : Makassar

Umur/Tgl lahir : 17/13 mei 1998

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sinassara Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : tukang tambal ban

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 februari 2015 s/d 22 februari 2015
2. Perpanjangan penuntutan umum tanggal 23 februari 2015 s/d 02 Maret 2015
3. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 27 februari 2015
4. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 15 april 2015 s/d 19 april 2015
5. Hakim pengadilan negeri Makassar tahanan rutan sejak tanggal 17 april 2015 s/d sekarang

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca Dsb ;

Menimbang Dsb ;

Memperhatikan pasal 365 ayat (3) KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG”
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (7) tujuh tahun ;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memrintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar jaket parasut warna merah
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan merk Defender
 - c. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
 - d. 1 (satu) buah dos HP
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
 - f. 1 (satu) celana punting jeans warna biru
 - g. 1 (satu) buah tas warna hitam
 - h. 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnahkan, dan
 - i. 1 (satu) keeping CD hasil rekaman tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 oleh SUPARMAN NYOMPA, SH. MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JUSTIAH SAID, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ANDI ARMASARI, SH Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa demikian didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Bapas.¹⁴

¹⁴Data Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2016.

B. Upaya Untuk Meminimalisir Kejahatan Begal Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Islam

1. Upaya untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum nasional

Berbicara mengenai upaya untuk meminimalisir kejahatan begal, Suparman

Nyompa, Hakim pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan:

Upaya untuk meminimalisir kejahatan ini di Pengadilan Negeri Makassar sudah berusaha mulai dengan cara preventif atau pencegahan maupun represif atau penindakan karena dengan memberikan hukuman akan menimbulkan efek jera pada seorang anak.¹⁵

Lebih jelas beliau mengatakan bahwa upaya untuk meminimalisir kejahatan begal ini terlebih dahulu harus melihat apa faktor penyebab anak melakukan kejahatan tersebut, dan upaya lain yaitu dengan cara Pre-Entif, Preventif, dan Represif.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

a. Pre-Entif

Upaya Pre-entif yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri seseorang, upaya pre-entif biasanya dilakukan dengan cara himbauan kepada masyarakat, memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik maka tidak akan terjadi kejahatan yang serupa.

¹⁵Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

b. Preventif

Upaya preventif ini berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan pemeriksaan STNK di tempat-tempat tertentu, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif.

c. Represif

Upaya ini dimaksudkan untuk menindak atau memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Selain itu, hukum nasional di dalam KUHP sudah mengatur mengenai hukuman atau sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana, siapa pun yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Modifikasi langkah represif maupun preventif dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegak hukum. dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun anak pelaku kenakalan anak.

Menurut Suparman Nyompa berkaitan dengan penggunaan secara represif dan preventif, khususnya untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak,

kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana preventif diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana represif.¹⁶

Hal ini menandakan ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak (faktor kriminogen). Kriminologi menempati posisi penting, disamping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami hakikat dan latar belakang kenakalan anak, juga menelusuri dan menemukan sarana nonpenal, dan pendekatan kriminologi diperlukan dalam konteks penggunaan sarana represif.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan begal ini yang dilakukan oleh anak di bawah umur selain dengan cara umum dan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana, juga diperlukan partisipasi dari masyarakat. Dalam proses penanggulangan kenakalan anak peranan masyarakat sangat dibutuhkan, karena seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu terjadi kurangnya kontrol sosial yang mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang.

2. Upaya untuk meminimalisir kejahatan begal menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana begal atau perampokan yaitu dengan dikenakan sanksi perampokan lebih berat

¹⁶Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

jika dibandingkan dengan pencurian, yaitu dibunuh yang kemudian disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang.

Adapun pembagian hukuman bagi pelaku perampokan yaitu Jika membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya dalam hal ini hukumannya wajib dibunuh kemudian disalib. Jika membunuh orang yang dirampoknya, tapi hartanya tidak diambil, hukumannya adalah wajib dibunuh saja. Jika hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan korbanya tidak dibunuh, sedangkan harta benda yang seperti ini hukumannya dipotong tangannya yang kanan dan kaki kirinya. Jika perampokan yang menakut-nakuti saja, dan tidak membunuh serta tidak mengambil hartanya, maka hukumannya hendaklah diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang dapat menjadi pelajaran kepadanya, agar ia tidak mengulangi perbuatannya yang tidak baik.¹⁷ Adapun upaya untuk meminimalisir kejahatan begal, Ustadz Nur Hasan, Menjelaskan:

Upaya untuk meminimalisir kejahatan begal yaitu mengikuti ketentuan yang terbaik dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan hukum Allah yang tidak ada keraguan didalamnya.¹⁸

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.”¹⁹

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 441.

¹⁸Nur Hasan (50 tahun), Imam Masjid Telkom, *Wawancara*, Makassar, 3 Februari 2016

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Fajar Mulya, t.th.), h. 2.

Lebih jauh beliau mengatakan bahwa petunjuk al-qur'an yang paling tepat dan begitupun hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan begal seharusnya berdasar pada al-Qur'an. Ambo Asse, Pimpinan Muhammadiyah (MU) Sulawesi Selatan, Menjelaskan:

“Hukuman qisas boleh diberlakukan jika pelakunya mengulangi kembali perbuatannya atau pelakunya *residivis*.”²⁰

Lebih jauh beliau mengatakan bahwa hukuman qisas lebih tepat diberlakukan untuk orang dewasa akan tetapi hukuman qisas untuk pelaku begal di bawah umur sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu.

Sesuai dengan kasus dengan perkara No. 101/Pid.Sus.Anak/PN/Mks. dimana pelakunya menghilangkan nyawa korbannya dan menurut Ustadz Nur Hasan bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku yaitu hukuman Qishas dan hukuman qishas ini berlaku umum dan tidak ada perbedaan antara anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu adapula upaya lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kejahatan begal yaitu²¹:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk pola pemikiran seorang anak. Karena pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan jika tingkat pengetahuannya lebih tinggi maka seseorang dapat membedakan mana perbuatan yang memiliki suatu manfaat tertentu dan mana perbuatan yang malah membuat masalah/kerugian.

²⁰Ambo Asse (54 tahun), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Wawancara*, 18 Februari 2016.

²¹Nur Hasan (50 tahun), Imam Masjid Telkom, *Wawancara*, Makassar, 3 Februari 2016

Ustadz Nur Hasan Mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya yang paling penting untuk meminimalisir pelaku kejahatan begal,²² oleh karena itu sejak dini pendidikan yang utama harus ditanamkan bagi seorang anak yaitu dengan pendidikan moral. Seorang anak harus dididik agamanya mulai dari kecil hingga ia dewasa supaya di mana pun ia berada namun karena tingginya tingkat pengetahuan pendidikan agama yang dimiliki oleh seorang anak maka tidak akan berpengaruh terhadap apapun apalagi pengaruh kejahatan. Ambo Asse, Pimpinan Muhammadiyah (MU) Sulawesi Selatan, menjelaskan:

“Upaya untuk meminimalisir atau memberantas kejahatan begal adalah langkah pembinaan generasi memang harus menjadi rekomendasi di jenjang pendidikan lebih dipertajam pada generasi bangsa dan juga perlunya pemberian kesadaran hukum.”²³

Lebih jauh beliau mengatakan pentingnya pendidikan sejak dini agar anak dapat mendisiplinkan ilmunya dan mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang akan ia lakukan.

b. Keluarga

Selain pendidikan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seorang anak. Karena pengaruh utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak adalah keluarga. Apabila hubungan orang tua dengan anak berjalan dengan harmonis maka kondisi tersebut dapat membentuk perilaku yang baik. Dan Jika seorang anak diberi didikan moral, akhlak dan tingkah laku yang baik dari orang tuanya maka anak tersebut dapat mengikuti didikan tersebut. Sehingga apabila seorang anak hendak melakukan suatu kejahatan, namun karena memiliki moral, akhlak dan tingkah laku yang baik maka secara otomatis anak

²²Nur Hasan (50 tahun), Imam Masjid Telkom, *Wawancara*, Makassar, 3 Februari 2016.

²³Ambo Asse (54 tahun), Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Wawancara*, 18 Februari 2016.

tersebut berpikir untuk melakukan kejahatan, apakah ia berpikir untuk keluarganya ataupun berpikir merasa malu terhadap perbuatan yang hendak dilakukannya.

c. Lingkungan

Setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya atau tempat tinggalnya. Karena teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan seorang anak yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum. Jika seorang anak berada pada lingkungan yang dominan memiliki akhlak dan moral yang baik maka anak tersebut akan memiliki perbuatan yang baik pula, begitu pula sebaliknya jika seorang anak berada pada lingkungan yang didominasi oleh orang yang sering melakukan kejahatan maka anak tersebut akan terpengaruh pada lingkungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pada kejahatan begal yang dilakukan oleh anak yaitu : dilihat dari segi usia yakni usia dalam penjatuhan hukuman untuk anak adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa, Terpenuhi unsur-unsur Pidana yaitu Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang mendapat luka berat atau mati, dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 ayat (4) subs pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dan Pembuktian di Persidangan Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah, yang terdiri dari: a) Lampiran alat bukti perkara, b) Keterangan Saksi-Saksi Dan Tersangka, c) Alat Bukti Surat, dan d) Petunjuk.
2. Upaya untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum nasional dan hukum Islam:
 - a. Upaya meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum nasional yaitu terlebih dahulu harus melihat apa faktor penyebab anak melakukan kejahatan tersebut, dan upaya lain yaitu dengan cara: a) Upaya Pre-entif yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik, upaya pre-entif biasanya dilakukan dengan cara himbauan

kepada masyarakat, b) Upaya preventif ini berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, dan c) Represif adalah Upaya ini dimaksudkan untuk menindak atau memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya.

- b. Upaya meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum Islam yaitu dengan upaya mengikuti ketentuan yang terbaik yakni ketentuan yang berdasar pada al-Qur'an yaitu pelaku kejahatan begal atau perampokan dikenakan sanksi perampokan lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian, yaitu dibunuh yang kemudian disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang. Alasan digunakan hukuman ini karena al-Qur'an merupakan hukum Allah, yang tidak ada keraguan didalamnya, serta perlu adanya pembenahan terhadap pendidikan, keluarga, dan lingkungan yang berdasar pada nilai-nilai keagamaan.

B. Implikasi

Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak utamanya kejahatan begal yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia agar dilakukan dengan perhatian khusus, sebab anak sebagai manusia yang kelak akan menjadi menerus bangsa sungguh sangat disayangkan apabila anak terlibat dengan kasus kejahatan yang tergolong berat. Upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi, guna mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dan diharapkan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku begal dapat menimbulkan efek jera dan dapat membangun watak seorang anak kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddi. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hadi, Anis Tanwir. *Memahami Fikih 5 untuk Kelas V Madrasah Ibtidayah*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Hamid, Arfin. *Hukum Pidana Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Hasan, Hamzah. *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- , *Hukum Pidana Islam 1*. cet. Ke-1; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hasim, Nur Kholif. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang, 1994.
- I Doi, Rahman. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, *KUH Perdata Burgerlijk Wetboek KUHP KUHAP*. t.t: Wipress, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya. t.th.
- Marwan, Jimmy. *Kamus Hukum*. t.t: Wiwik W, 2009.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2011.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustamin, Muh. Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar : Alauddin Press, 2009.
- Musyahid, Achmad. *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Perss, 2012.
- Noerwahidah. *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Rahman Abdul. *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sambas, Nandang. *Pembahasan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Grafika Aditama, 2006.
- al-Nasai, Ahmad bin Syu'aim bin 'Abdurrahman, *Sunan al-Nasa'i*, juz VIII Cet. II; Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- al-Nasai, Muslim bin al-Hajjaj bin 'Abul-Husain al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, juz. V Beirut: Dar Ihya' al-Tara'iq al-'Arabiyyah, t.th.
- al-Syaibani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hisham bin Asadi, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz. VI Cet. I; Beirut: 'Alim al-Kutub, 1998.
- al-Azdi, Sulaiman bin al-Asy'as bin 'Abu Da'ud al-Sajastani, *Sunan Abi Da'ud*, juz IV Beirut al-Fikr, t.th.
- Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002, *Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007.
- Widjaja, Abdi. *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* Makassar: Alauddin University Perss, 2013.

Pedoman Wawancara

Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas dan reliabilitas, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut :

1. Menurut Bapak yang mana termasuk kategori tindak pidana begal?
2. Melihat jumlah kejahatan begal yang ada di Makassar menurut Bapak/ Ibu apa faktor penyebab anak melakukan kejahatan begal?
3. Apa pertimbangan Bapak/ Ibu dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan begal khususnya dalam putusan No: 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS.?
4. Menurut Bapak/ Ibu apakah ada perbedaan dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dan orang dewasa dalam kejahatan begal ?
5. Menurut Bapak/ Ibu upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kejahatan begal ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam?
6. Menurut Bapak/ Ibu apakah sanksi pidana yang diberikan oleh anak pelaku begal sudah efektif dan dapat menimbulkan efek jera?



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Jalan Sultan Alauddin No.191 Telp. (0411) 868547 Fax (0411) 868275 Makassar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W23.E1.UM.01.02 -146 /2016

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Ummul Khairi Masdar
N I M	: 10300112014
Program Studi	: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin
Alamat	: Jln. Pesona Prima Griya Makassar

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tanggal 28 Januari s/d 28 Maret 2016 dalam rangka penyusunan **skripsi** dengan judul : "**TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PADA KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Maret 2016



PIH. KEPALA
AH ZUNADI, Bc. IP, S. Sos, MM
NIP. 19651010 199103 1 001



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 23 Februari 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ /4/ /HKM/II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

H. RAMLI DJALIL.SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **UMMUL KHAIRI MASDAR**
N I M : 10300112014
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Alamat : Pesona Prima Griya Blok M/47. Antang
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN SANKSI PADA KEJAHATAN
BEGAL YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NO. 101/PID.SUS-ANAK/2015/PN.MKS)"**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tanggal 25 Januari 2016, dengan Nomor : SI.1/PP.00.99/356/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA,

H. RAMLI DJALIL. SH.,MH
NIP.1962123119910310045

RIWAYAT HIDUP



Ummul Khairi Masdar, lahir pada tanggal 6 Februari 1995 di Bone, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Alm. H. Masakkirang S.Ag dan Ibu Hj. Rosmi S.Pd.

Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari SD Inpres 377 Bontopadang tamat pada tahun 2006, dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Neg 1 Maros tamat pada tahun 2009 Kemudian penulis melanjutkan sekolah ketingkat menengah atas di SMA Neg 2 Maros tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.